



**LAPORAN AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PERENCANAAN PENATAAN RUANG
DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI**

Oleh:

Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si
NIP. 198504262010011011
NDH: 001

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PERENCANAAN PENATAAN RUANG
DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI

Oleh:

Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si
NIP. 198504262010011011
NDH : 001

Telah disetujui untuk diseminarkan pada:
Hari/Tanggal : / Desember 2025
Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

COACH,

MENTOR,

Dra. Hariyati, S.H., M.M.
NIP. 19610728 198803 1 007

H. Ahmad Fuad, S.Si
NIP.197511212010011007

Mengetahui / Menyetujui:
KEPALA BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M.
NIP. 19750707 199703 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PERENCANAAN PENATAAN RUANG
DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI**

Oleh:

Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si
NIP. 198504262010011011
NDH : 001

Telah diseminarkan dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : / Desember 2025

Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

COACH,

NARA SUMBER /PENGUJI,

Dra. Hariyati, S.H., M.M.
NIP. 19610728 198803 1 007

Tri Hartati, SE, M.Si
NIP. 19721219 200604 2 006

**Mengesahkan :
KEPALA BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M.
NIP. 19750707 199703 1 003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Aksi Perubahan dengan judul “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Penataan Ruang di Dinas PUPR Kabupaten OKI”. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk implementasi pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Prof. Dr. H. M. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M., atas arahan, bimbingan, serta kesempatan yang diberikan sehingga aksi perubahan ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Mentor, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir, H. Ahmad Fuad, S.Si, yang telah memberikan dukungan, masukan, dan pendampingan selama proses penyusunan hingga implementasi aksi perubahan.
3. Coach dari BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Dra. Hariyati, S.H., M.M., atas bimbingan, motivasi, serta evaluasi berkelanjutan sehingga aksi perubahan ini dapat berkembang secara sistematis dan terarah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir, rekan-rekan peserta pelatihan, serta semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kelancaran pelaksanaan aksi perubahan ini.

Harapan penulis, laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang Penataan Ruang, serta menjadi referensi dalam upaya mendorong pelayanan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Palembang, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Aksi Perubahan	5
C. Manfaat Aksi Perubahan	5
D. Ruang Lingkup	6
E. Analisa Masalah	6
F. Strategi Penyelesaian Masalah	11
G. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan.....	16
H. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	17
BAB II	21
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	21
A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan	21
B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan TI)	24
C. Pengelolaan Tim	26
BAB III	30
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	30
A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan	30
B. Manfaat Aksi Perubahan	43

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	46
BAB IV	51
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	51
A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek	51
B. Penetapan Target Jangka Menengah dan Jangka Panjang	52
BAB V	55
KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	55
A. Rangkuman Pemilihan Mata Pelatihan Pilihan dalam Mendukung Aktualisasi Kepemimpinan PKP	55
B. Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja	57
C. Membangun Kerjasama Tim	58
D. Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan	59
BAB VI	61
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	61
A. Penerapan Strategi Komunikasi	61
B. Publikasi	63
C. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan	64
BAB VII	67
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	67
A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan	67
B. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri	69
BAB V	71
PENUTUP	71
A. Simpulan	71

B. Saran	72
LAMPIRAN	76
Lampiran 1 Pernyataan dukungan terhadap Aksi Perubahan	
Lampiran 2 Dokumentasi Foto Dukungan Aksi perubahan	
Lampiran 3 SOP Mekanisme Komunikasi Perencanaan Penataan Ruang	
Lampiran 4 Komitmen Tindak Lanjut	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penetapan Kriteria APKL.....	8
Tabel 1.2 Definisi APKL.....	8
Tabel 1.3 Matriks APKL.....	8
Tabel 1.4 Pentahapan Milestone.....	13
Tabel 1.5 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi.....	16
Tabel 1.6 Formulir Penilaian Gabungan (Akhir).....	17
Tabel 1.7 Proses dan Progres/Hasil dari Pengembangan Diri.....	18
Tabel 3.1 Manfaat Aksi Perubahan.....	43
Tabel 3.3 Kebutuhan Pelatihan Bagi Pihak Terdampak.....	46
Tabel 7.1 Progres Pengembangan Diri.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Fishbone Analysis</i>	9
Gambar 3.1 Konsultasi dengan Mentor.....	31
Gambar 3.2 Undangan Rapat, Daftar Hadir, dan Notulen Rapat.....	32
Gambar 3.3 Rapat Koordinasi Tim Efektif.....	33
Gambar 3.4 SK Tim Efektif.....	34
Gambar 3.5 Dokumen SOP Mekanisme Komunikasi Perencanaan Penataan Ruang.....	35
Gambar 3.6 Sosialisasi SOP.....	37
Gambar 3.7 Lembar Distribusi Dokumen.....	37
Gambar 3.8 Pelatihan Pegawai.....	38
Gambar 3.9 Undangan Pelatihan, Daftar Hadir.....	39
Gambar 3.10 Tim Efektif Melakukan Update Data Via Google Spreadsheet	40
Gambar 3.11 Formulir Google untuk Penyampaian Aspirasi Masyarakat	41
Gambar 3.12 Formulir Feedback Penerapan SOP.....	42
Gambar 3.13 Pelatihan Teknis, Pengolahan Data dan Pemahaman Peraturan Perundangan (Sesi 1).....	49
Gambar 3.14 Pelatihan Komunikasi dan Koordinasi (Sesi 2).....	49
Gambar 3.15 Daftar Hadir Pelatihan Sesi 1 dan Sesi 2.....	50
Gambar 4.1 Komitmen Tindak lanjut Aksi Perubahan.....	52
Gambar 6.1 SOP Mekanisme Komunikasi Perencanaan Penataan Ruang di Upload pada Media Sosial Dinas PUPR.....	64
Gambar 6.2 Peta Analisa Stake Holders Sebelum Kegiatan Aksi Perubahan.....	66

BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah salah satu pilar utama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kabupaten OKI. Terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKI mencakup wilayah seluas 17.073,7502 km², menjadikan peran Dinas PUPR sangat strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten OKI terdiri dari beberapa bidang yang masing-masing memiliki fokus, tanggung jawab, dan mandat khusus dalam menjalankan fungsi dinas. Setiap bidang bertugas untuk mengelola aspek tertentu dari pekerjaan umum dan penataan ruang, mulai dari perencanaan dan desain hingga pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek infrastruktur. Proyek-proyek ini mencakup berbagai jenis infrastruktur, termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, sistem drainase, serta bangunan dan fasilitas publik lainnya.

Penataan ruang merupakan aspek fundamental dalam pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6/2023) telah menghapus dan mengubah berbagai peraturan yang bersifat sektoral. Salah satu peraturan yang mengalami perubahan adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU Nomor 6/2023. Selain UU Nomor 6/2023, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP Nomor

21/2021) dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Permen ATR Nomor 21/2021). Dalam PP Nomor 21/2021 dan Permen ATR Nomor 21/2021, disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan tertib tata ruang, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 43 Permen ATR Nomor 21/2021 dan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penilaian pernyataan mandiri Pelaku UMK.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki peran krusial dalam mengelola dan mengawasi penataan ruang di wilayahnya. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai isu strategis muncul yang menghambat efektivitas perencanaan dan pengendalian tata ruang. Bidang Penataan Ruang, sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas tersebut, menghadapi beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dan terobosan segera.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten masih menjadi tantangan besar. Sebagian pegawai belum sepenuhnya menguasai aspek teknis seperti pemanfaatan perangkat lunak pemetaan, analisis spasial, maupun penyusunan dokumen sesuai standar nasional. Kondisi ini sering menyebabkan hasil perencanaan kurang optimal, lambat dalam merespons kebutuhan pembangunan, serta kesulitan menyesuaikan diri dengan regulasi dan teknologi terbaru. Akibatnya, pengendalian tata ruang sulit berjalan konsisten dan kualitas pelayanan publik belum maksimal.

Kedua, lemahnya integrasi antar-data sektoral masih menjadi kendala mendasar. Data yang dikelola oleh berbagai instansi seperti

BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, hingga ATR/BPN belum sepenuhnya terhubung dengan data penataan ruang. Fragmentasi data ini menimbulkan tumpang tindih informasi, kesenjangan data, bahkan potensi konflik dalam pemanfaatan ruang. Padahal, perencanaan tata ruang yang baik sangat bergantung pada data yang akurat, mutakhir, dan saling terkoneksi antar sektor.

Ketiga, partisipasi masyarakat yang rendah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada legitimasi rencana tata ruang. Rendahnya literasi spasial, minimnya sosialisasi, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas aspirasi membuat masyarakat cenderung pasif atau apatis. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat desa dan daerah. Padahal, partisipasi publik yang aktif sangat penting untuk menciptakan tata ruang yang inklusif, berkelanjutan, serta benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, program aksi perubahan yang diusung penulis menempatkan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai fokus utama. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat kanal komunikasi publik, masyarakat desa dapat lebih mudah terlibat dalam perencanaan, memberikan masukan, dan mengawasi pemanfaatan ruang. Langkah ini sejalan dengan Astacita Presiden, khususnya butir ke-7 “Indonesia yang Membangun dari Desa dan Daerah.” Melalui penguatan peran desa sebagai bagian dari perencanaan tata ruang, diharapkan pembangunan tidak hanya berorientasi dari pusat ke daerah, tetapi tumbuh dari aspirasi dan kebutuhan lokal masyarakat desa, sehingga tercipta tata kelola ruang yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

B. Tujuan Aksi Perubahan

1. Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek dari adanya program perubahan adalah untuk terbentuknya sistem perencanaan dan evaluasi penataan ruang yang lebih terstruktur dengan berbasis pada penerapan teknologi digital, peningkatan partisipasi masyarakat melalui forum atau media komunikasi publik, serta penyusunan SOP sederhana yang dapat segera diimplementasikan oleh Bidang Penataan Ruang.

2. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah dari adanya program perubahan adalah untuk terciptanya sistem integrasi data dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait, sehingga proses perencanaan tata ruang dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu meminimalisasi tumpang tindih kebijakan antar sektor.

3. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang dari adanya program perubahan adalah untuk terwujudnya tata kelola penataan ruang yang modern, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, integrasi data sektoral, serta pemanfaatan teknologi informasi, sehingga mampu menghasilkan perencanaan ruang yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

C. Manfaat Aksi Perubahan

1. Manfaat Jangka Panjang

Mewujudkan tata kelola penataan ruang yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan dengan dukungan digitalisasi serta peningkatan kompetensi SDM sehingga lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

2. Manfaat Jangka Menengah

Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder melalui sistem data sektoral yang terhubung serta kolaborasi dalam perencanaan tata ruang Kabupaten OKI.

3. Manfaat Jangka Pendek

Meningkatkan efektivitas perencanaan dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui penerapan teknologi digital sederhana serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

D. Ruang Lingkup

Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan aksi perubahan yang hanya berlangsung selama 2 (dua) bulan, ruang lingkup kegiatan ini difokuskan pada pengembangan fondasi penting bagi sistem evaluasi pemanfaatan ruang yang lebih efisien dan efektif, khususnya pada wilayah Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Fokus wilayah ini dipilih sebagai lokasi percontohan (pilot area) dengan harapan mampu menunjukkan dampak nyata dalam jangka pendek sekaligus menjadi model pengembangan untuk wilayah lain di Kabupaten OKI pada tahap selanjutnya. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses evaluasi pemanfaatan ruang, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih responsif dan berbasis data. Selama periode dua bulan pelaksanaan, kegiatan akan dimulai dengan analisis permasalahan di lapangan, dilanjutkan dengan perbaikan sistem melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengembangan sistem digital sederhana, serta pelatihan bagi staf yang terlibat.

E. Analisa Masalah

1. Isu-isu yang Ada di Bidang Penataan Ruang DPUPR OKI

Beberapa isu permasalahan yang terjadi pada Bidang Penataan Ruang DPUPR OKI yaitu:

a. Keterbatasan SDM Kompeten

Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten menjadi hambatan utama dalam mendukung efektivitas perencanaan dan pengendalian tata ruang. Kurangnya kemampuan teknis, minimnya pelatihan, serta keterbatasan tenaga ahli menyebabkan kualitas penyusunan rencana tata ruang belum maksimal dan sering tertinggal dari perkembangan teknologi serta regulasi terbaru.

b. Kurangnya Integrasi Antar-Data Sektoral

Integrasi data antar sektor yang masih lemah menimbulkan kesulitan dalam menghasilkan perencanaan ruang yang konsisten dan menyeluruh. Setiap instansi cenderung menggunakan basis data masing-masing, sehingga sering terjadi perbedaan informasi, tumpang tindih program, bahkan potensi konflik kebijakan yang menghambat efektivitas pembangunan.

c. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang menjadi salah satu penyebab kurangnya legitimasi dan relevansi rencana yang dihasilkan. Rendahnya literasi, kurangnya sosialisasi, serta terbatasnya ruang partisipasi membuat aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan penataan ruang.

d. Metode Perencanaan Masih Konvensional

Penggunaan metode perencanaan yang masih konvensional menyebabkan proses penyusunan tata ruang berjalan lambat, kurang efisien, dan tidak adaptif terhadap perkembangan digital. Keterlambatan adopsi teknologi seperti GIS, big data, dan sistem informasi spasial membuat perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan real-time, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan strategis.

2. Penapisan Isu Menggunakan Tabel APKL

Setelah melakukan inventarisir terhadap isu-isu yang ada di Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. OKI, maka selanjutnya penulis menganalisis isu yang diangkat dengan menggunakan metode USG, yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penetapan Kriteria APKL

Bobot Nilai	Keterangan
5	Sangat Kuat
4	Kuat
3	Sedang
2	Kurang
1	Sangat Kurang

Sumber: Data yang diolah, 2025

Tabel 1.2 Definisi APKL

Kriteria	Keterangan
Aktual	Aktual terjadi dan menjadi topik pembahasan
Problematis	Kompleksitas isu menuntut perlu segera ditindaklanjuti
Kekhalayakan	Isu menyangkut hajat hidup orang banyak
Layak	Logis, realistis, dan relevan

Sumber: Data yang diolah, 2025

Setelah mengetahui metoder APKL melalui penjelasan tabel di atas, selanjutnya dilakukan Analisa terhadap isu yang terkait menggunakan tabel APKL yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Matriks APKL

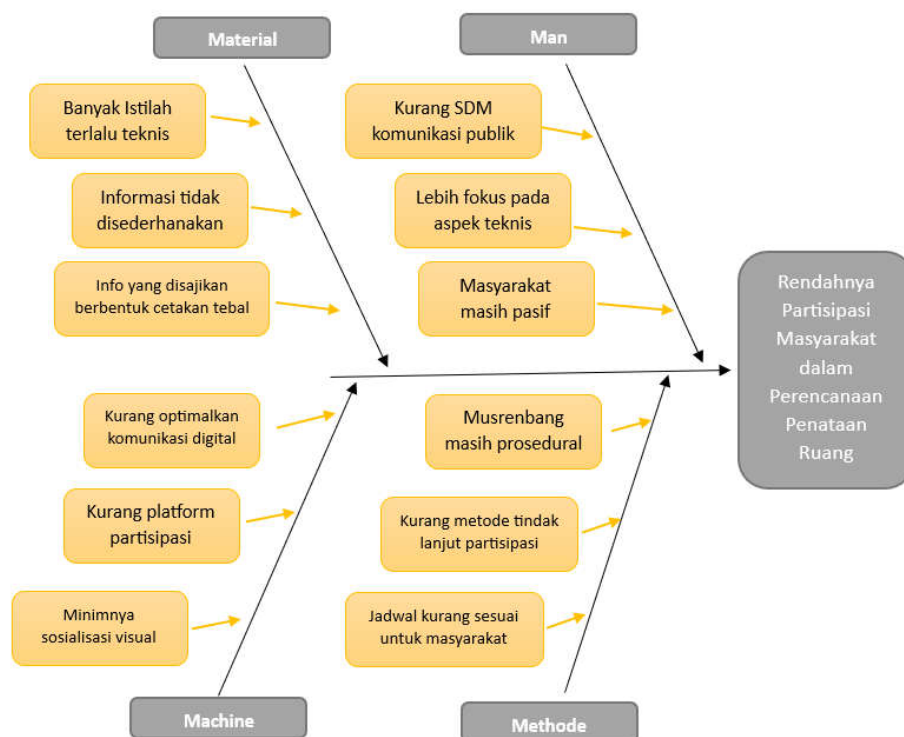
No	Isu	A	P	K	L	Jml	Peringkat
1	Keterbatasan SDM Kompeten	5	5	4	5	19	2
2	Kurangnya Integrasi Antar-Data Sektoral	4	4	4	4	16	3
3	Partisipasi masyarakat yang rendah terhadap perencanaan Penataan	5	5	5	5	20	1

	Ruang								
4	Metode	Perencanaan	Masih	4	4	3	3	14	4
	Konvensional								

Sumber: Data yang diolah, 2025

3. Analisa Sumber Masalah Menggunakan Analisa *Fish Bone*

Melalui Analisa isu menggunakan matriks APKL di bagian sebelumnya, penulis memilih isu Partisipasi masyarakat yang rendah terhadap perencanaan Penataan Ruang sebagai Isu Utama (*Core Issue*) yang perlu segera ditindak lanjuti dan dianalisa lebih lanjut menggunakan *Fishbone Analysis*.



Gambar 1.1 *Fishbone Analysis*

Dalam konteks isu Partisipasi masyarakat yang rendah, kita dapat menggunakan kategori Man, Methode, Material, dan Machine untuk membagi penyebab-penyebab utama. Berikut adalah hasil analisis menggunakan kategori tersebut:

1. Man (Orang)

- Aparatur lebih fokus pada aspek teknis, belum terampil mengelola partisipasi masyarakat.
- Tidak ada petugas khusus yang menguasai komunikasi publik atau fasilitasi dialog.
- Masyarakat sendiri masih pasif dan menganggap forum musrenbang hanya formalitas.

2. Methode (Metode)

- Proses musrenbang dan konsultasi publik cenderung prosedural, bukan dialog interaktif.
- Tidak ada mekanisme jelas untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Waktu dan format forum sering tidak ramah masyarakat (jadwal kurang sesuai, forum terlalu teknis).

3. Material (Material)

- Dokumen tata ruang (RTRW/RDTR) penuh istilah teknis dan sulit dipahami masyarakat awam.
- Tidak ada versi populer atau ringkasan sederhana yang bisa dipelajari masyarakat.
- Informasi sering hanya disampaikan dalam bentuk dokumen cetak tebal, tanpa penyederhanaan konten.

4. Machine (Mesin)

- Media komunikasi digital (website, aplikasi, media sosial) belum digunakan secara optimal untuk menampung aspirasi.
- Tidak ada platform partisipasi berbasis peta interaktif (GIS) yang mudah diakses masyarakat.

Materi sosialisasi masih minim media visual (infografis, video pendek) yang sederhana.

4. Dampak Masalah

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penataan ruang menimbulkan sejumlah dampak signifikan terhadap kualitas tata kelola ruang di Kabupaten OKI. Pertama, rencana tata ruang yang disusun cenderung tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Kedua, minimnya keterlibatan masyarakat melemahkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan, karena masyarakat merasa tidak dilibatkan sejak awal dan akhirnya kurang memiliki rasa memiliki (sense of belonging) terhadap hasil perencanaan. Kondisi ini sering berujung pada resistensi, penolakan, atau rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan pemanfaatan ruang. Selain itu, ketiadaan masukan dari masyarakat mengakibatkan peluang potensi lokal yang seharusnya dapat dioptimalkan justru terabaikan, sehingga pembangunan menjadi kurang berkelanjutan dan tidak inklusif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperbesar risiko konflik sosial, ketidakadilan pembangunan, serta menurunkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.

F. Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan Inovasi

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi tata ruang. Kondisi ini menyebabkan banyak kebijakan tata ruang belum sepenuhnya mencerminkan

kebutuhan masyarakat di tingkat desa maupun daerah, sehingga legitimasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil perencanaan menjadi lemah. Untuk itu, melalui program aksi perubahan ini penulis melakukan sebuah terobosan inovasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas, praktis, dan inklusif.

Inovasi pertama diwujudkan dengan pemanfaatan Google Form sebagai sarana digital untuk menampung aspirasi, usulan, serta masukan masyarakat secara langsung. Kanal ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga partisipasi tidak lagi terhambat oleh keterbatasan jarak dan waktu. Data yang terkumpul melalui Google Form kemudian diintegrasikan ke dalam Google Spreadsheet sebagai pusat dokumentasi dan pengolahan data bersama lintas bidang maupun instansi. Dengan mekanisme ini, setiap suara masyarakat terdokumentasi secara transparan, mudah dianalisis, serta dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan tata ruang.

Selain itu, penulis juga memanfaatkan Zoom Meeting untuk menyelenggarakan forum konsultasi publik, rapat koordinasi, dan diskusi perencanaan secara daring dengan masyarakat maupun stakeholder. Inovasi ini memperluas jangkauan partisipasi hingga ke masyarakat desa dan daerah terpencil yang sebelumnya sulit terlibat dalam forum tatap muka. Sementara itu, WhatsApp Group digunakan sebagai media komunikasi cepat dan efektif baik secara internal maupun eksternal. Melalui kanal ini, informasi mengenai agenda perencanaan, hasil rapat, maupun kebijakan terbaru dapat tersampaikan secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan respon dalam proses komunikasi publik.

Melalui kombinasi empat aplikasi digital tersebut, aksi perubahan ini menghadirkan sistem partisipasi masyarakat yang lebih terbuka, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Terobosan ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan tata ruang, tetapi juga sejalan dengan Astacita Presiden, khususnya butir ke-7 “Indonesia yang Membangun dari Desa dan Daerah.” Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat desa melalui kanal digital, kebijakan penataan ruang menjadi lebih inklusif, berbasis kebutuhan lokal, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2. Milestone Aksi Perubahan

**Tabel 1.4 Pentahapan Milestone
Jangka Pendek**

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Waktu
A. TAHAP PERSIAPAN				
1.	Melakukan konsultasi dengan Mentor	a. Menemui dan menghadap mentor b. Meminta dukungan mentor c. Meminta arahan mentor	1. Surat Dukungan 2. Laporan hasil konsultasi 3. Foto/video	Minggu III Oktober 2025
2.	Melapor kepada Atasan Langsung (Mentor) dan Kepala Dinas terkait implementasi program aksi perubahan yang akan	a. Menemui dan menghadap atasan (Kepala Dinas) b. Meminta arahan pelaksanaan aksi perubahan c. Menyampaikan gagasan aksi perubahan beserta usulan tim aksi	1. Notulen hasil konsultasi 2. SK Tim Efektif 3. Foto/video	Minggu III Oktober 2025

	dilaksanakan.	perubahan d. Meminta persetujuan SK Tim Efektif		
3.	Melaksanakan rapat persiapan aksi perubahan dengan tim efektif	a. Menyiapkan bahan rapat, undangan dan daftar hadir b. Melaksanakan rapat dengan tim efektif c. Menyampaikan SK tim efektif dan membagi tugas	1. Surat Undangan Rapat 2. Daftar Hadir 3. Notulen Rapat 4. Foto/Video	Minggu IV Oktober 2025
B. TAHAP PELAKSANAAN				
4.	Menyiapkan dokumen berupa SOP	a. Menyusun dokumen kebutuhan program aksi perubahan yaitu SOP b. Menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada pimpinan untuk di sahkan c. Mendistribusikan serta melaksanakan sosialisasi ke setiap bidang	1. Dokumen SOP 2. Lembar serah terima (tanda bukti) distribusi dokumen 3. Foto/video	Minggu I November 2025
5.	Meng-implementasi-	a. Melakukan uji coba SOP	1. Dokumen SOP	Minggu II November

	kan SOP	b. Mengunggah SOP ke media sosial Dinas	2. Video uji coba 3. Foto kegiatan	2025
6	Memberikan pelatihan SDM secara Internal	a. Membuat surat undangan dan daftar hadir pelatihan b. Melaksanakan pelatihan bagi yang terlibat di dalam proses evaluasi pemanfaatan lahan	1. Surat undangan pelatihan 2. Daftar hadir pelatihan 3. Laporan hasil pelatihan 4. Foto/Video	Minggu II November 2025
7	Melakukan update data berbasis cloud	a. Memanfaatkan fitur google spreadsheet untuk memudahkan setiap tim yang terlibat dalam melihat progress dan update data. b. Membuat grup WhatsApp untuk koordinasi internal agar memudahkan komunikasi c. Melakukan check ulang (<i>updatinog</i>)	1. Google Spreadsheet 2. Tangkapan layar group Whatsapp 3. Foto/video	Minggu II November 2025

C. TAHAP EVALUASI				
8	Mengumpulkan feedback dari setiap stakeholder yang terlibat	a. Menyebarkan form penilaian melalui google form untuk meminta umpan balik atau feedback dari penerapan prosedur yang baru b. Melakukan pendataan dan analisa hasil dari feedback yang telah dikumpulkan c. Mengumpulkan hasil feedback	1. Google form 2. Rekap data feedback 3. Laporan hasil 4. Foto/video	Minggu III November 2025

G. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Berikut adalah beberapa konsekuensi kebutuhan kompetensi baru dan program pelatihan yang relevan:

Tabel 1.5 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

No	Pihak Terdampak	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan
1	Pegawai di seluruh bidang DPUPR Kab. OKI	Kemampuan menggunakan Teknologi Informasi seperti Google Form untuk pengumpulan data, serta System pendataan komputerisasi	In house Training dasar dan lanjutan dalam penggunaan aplikasi berbasis web, seperti Google Form, Google Sheets, serta aplikasi lain yang terkait dengan pengolahan dan analisis data

2	Pegawai bagian pengolahan data di seluruh bidang DPUPR Kab. OKI	Manajemen Data dan Pengolahan Informasi	In House Training pengelolaan database, verifikasi dan validasi data, serta analisis data
3	Pegawai di seluruh bidang DPUPR Kab. OKI	Komunikasi Efektif dan Koordinasi Digital	In House Training yang mencakup penggunaan platform komunikasi internal (email, video conference) serta komunikasi dengan masyarakat melalui platform daring.

H. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

1. Pemetaan Hasil Penilaian

Tabel 1.6 Formulir Penilaian Gabungan (Akhir)

Nama Peserta :	Nama Mentor :
NIP :	NIP: :
Jabatan :	Jabatan :
Instansi :	Instansi :
Program :	

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta					
Mentor					
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen					
Kualifikasi Per Sub Komponen					

Keterangan Kualifikasi	Akhir Sikap Perilaku
9.99-10 : Istimewa	0.00
7-8.99 : Baik	
5-6.99 : Cukup	Kualifikasi:
3-4.99 : Kurang	Sangat Kurang
1-2.99 : Sangat Kurang	

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

2. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 1.7 Proses dan Progres/Hasil dari Pengembangan Diri

No	Komponen/sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1.	Tanggung Jawab	Tingkatkan rasa kepemilikan atas tugas dan tanggung jawab individu melalui penerapan target yang jelas dan penilaian kinerja berkala.	Menerapkan SOP evaluasi pemanfaatan ruang bersama tim efektif			
2.	Komitmen	Perkuat motivasi peserta dengan memperjelas tujuan jangka panjang aksi perubahan.	Memimpin rapat tim efektif dan menghadap pimpinan terkait komitmen jangka panjang aksi perubahan			
3.	Konsistensi	Dorong peserta untuk menjaga rutinitas dalam mencapai target melalui pencatatan kemajuan harian atau mingguan.	Memimpin tim efektif menjalankan SOP pemanfaatan ruang			
4.	Kerjasama Internal	Adakan workshop kolaboratif dan	Membentuk tim efektif dan menjadi pimpinan			

		permainan tim untuk memperkuat koordinasi antar anggota tim.	dari tim yang berkomitmen menjalankan kegiatan aksi perubahan			
5.	Kerjasama Eksternal	Berikan pelatihan komunikasi eksternal dan negosiasi untuk memperkuat hubungan dengan pihak luar, seperti stakeholder dan mitra kerja.	Berkomunikasi dengan masyarakat dan kepala desa untuk mensosialisasikan kegiatan aksi perubahan			
6.	Komunikasi	Kembangkan kemampuan komunikasi melalui pelatihan presentasi, public speaking, dan pengelolaan konflik.	Memimpin rapat dan menjadi pemateri untuk beberapa program pelatihan			
7.	Pelayanan Publik	Tingkatkan pemahaman tentang pelayanan prima melalui pelatihan customer service untuk ASN.	Menyediakan fitur formulir online yang dapat diakses oleh masyarakat luas			
8.	Adaptabilitas	Latih peserta untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan melalui simulasi skenario kerja	Beradaptasi dengan baik bersama tim yang baru dibentuk untuk menerapkan kegiatan aksi			

		dinamis.	perubahan			
9.	Pengembangan orang lain	Sediakan program mentoring atau coaching bagi peserta untuk meningkatkan keterampilan membimbing rekan kerja.	Membuka 2 sesi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis bagi pegawai di PUPR khususnya di bidang Penataan Ruang			
10.	Orientasi pada hasil	Tetapkan sistem pencapaian yang fokus pada hasil konkret dan terukur.	Membuka kritik dan saran terhadap penilaian langsung dari berbagai pihak untuk melihat hasil yang lebih objektif			
11.	Inisiatif	Berikan ruang bagi peserta untuk mengusulkan ide-ide baru melalui sesi brainstorming atau kompetisi ide inovasi.	Mengusulkan 2 sesi pelatihan yang meningkatkan kompetensi pegawai kepada kepala bidang			

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan

Integritas merupakan salah satu fondasi penting dalam kinerja pelayanan publik, khususnya di Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, integritas ASN menjadi landasan utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan negara, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Integritas ini dapat diukur melalui beberapa aspek penting, seperti kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks Bidang Penataan Ruang, kejujuran menjadi elemen krusial ketika menyangkut transparansi proses Perencanaan Penataan Ruang. Setiap kegiatan harus didasarkan pada data yang akurat, laporan yang jujur, dan tidak ada pelanggaran aturan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur standar teknis dan prosedur pelaksanaan pembangunan juga menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas di bidang ini. Dengan mematuhi aturan yang berlaku, setiap pegawai diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara, integritas didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Di Bidang Penataan Ruang, nilai

dan norma ini mencakup tanggung jawab dalam memastikan bahwa perencanaan penataan ruang yang baik memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, dan pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja ASN di sektor ini. Dengan membangun budaya kerja yang transparan dan etis, para pegawai diharapkan dapat menghindari potensi penyimpangan atau korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

Di samping itu, tanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil merupakan cerminan dari komitmen integritas. Setiap pegawai Bidang Penataan Ruang harus siap menghadapi konsekuensi atas setiap keputusan yang diambil, baik dalam hal teknis proses penataan ruang maupun pengelolaan sumber daya. Ketika menghadapi risiko yang menyertai proyek infrastruktur, pegawai yang berintegritas akan mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko tersebut, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dengan membangun integritas yang kuat, Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten OKI dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan etika dan integritas dalam kinerja pelayanannya. Upaya tersebut mencakup berbagai inisiatif dan program yang berfokus pada penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan profesionalisme para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUPR. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain mencakup sosialisasi dan pelatihan integritas ASN, penerapan sistem akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan internal, pengembangan sistem pengaduan dan transparansi publik, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi.

Dinas PUPR Kabupaten OKI secara berkala mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya etika dan integritas di lingkungan kerja. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai aturan-aturan yang mengatur integritas, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun 2020. Dalam sosialisasi ini, ASN juga mendapatkan pelatihan yang diiringi diskusi mengenai contoh kasus integritas dan etika kerja yang relevan di sektor pelayanan publik, sehingga mereka dapat memahami cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

Selain itu, Dinas PUPR OKI telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi. Melalui SAKIP, setiap pegawai diwajibkan melaporkan hasil kerja mereka secara terukur dan objektif, sehingga kinerja dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penerapan SAKIP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kontrol internal dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Penguatan pengawasan internal juga menjadi langkah penting yang diambil oleh Dinas PUPR OKI. Pengawasan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap proses dan keputusan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika kerja yang berlaku. Unit pengawasan internal proaktif dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan atau pelanggaran etika serta mengambil langkah korektif jika diperlukan. Pengawasan ini meliputi penggunaan anggaran, pelaksanaan proyek, dan pemenuhan standar pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal pengembangan sistem pengaduan dan transparansi publik, Dinas PUPR OKI telah meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi proyek infrastruktur dan layanan publik melalui kanal komunikasi seperti website resmi, media sosial, dan papan

informasi publik. Selain itu, sistem pengaduan masyarakat dioptimalkan melalui mekanisme yang lebih transparan dan responsif, termasuk aplikasi pengaduan dan layanan hotline. Dengan adanya keterbukaan informasi dan mekanisme pengaduan yang efisien, masyarakat dapat berperan langsung dalam memantau kinerja Dinas PUPR, mendorong ASN untuk bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dinas PUPR OKI juga telah menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas terkait dengan kinerja dan integritas ASN. Pegawai yang menunjukkan dedikasi tinggi, kejujuran, dan integritas dalam tugasnya diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Sebaliknya, pegawai yang melakukan pelanggaran etika atau integritas diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sistem ini diharapkan dapat memotivasi ASN untuk selalu menjaga etika dan integritas dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan TI)

Di era digital saat ini, penerapan teknologi informasi (IT) menjadi elemen strategis dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, serta kualitas layanan publik. Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) telah memanfaatkan berbagai platform digital untuk mendukung pengelolaan data, koordinasi, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang tertib, terarah, dan berkelanjutan. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses kerja administrasi dan teknis, tetapi juga memungkinkan terjadinya pengawasan, evaluasi, dan komunikasi yang lebih responsif antarpegawai maupun pemangku kepentingan.

Salah satu bentuk inovasi digital tersebut adalah pemanfaatan Google Spreadsheet dan Google Form sebagai sarana pengelolaan dan penghimpunan data penataan ruang. Google Spreadsheet

digunakan sebagai wadah penyimpanan dan kolaborasi data perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk dokumen izin, peta, serta status permohonan masyarakat. Sistem ini memudahkan monitoring perkembangan proses administrasi dan menghasilkan pelaporan yang lebih transparan. Sementara itu, Google Form digunakan untuk menampung usulan serta pengaduan masyarakat terkait pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten OKI, seperti alih fungsi lahan, kesesuaian tata ruang, dan permohonan layanan administrasi. Mekanisme ini mempercepat proses tindak lanjut dan meminimalisir hambatan yang sering terjadi pada prosedur manual.

Dalam memperkuat koordinasi internal maupun eksternal, WhatsApp Group menjadi media komunikasi cepat antara jajaran pegawai, pimpinan, serta pihak terkait di lapangan, seperti pemerintah kecamatan dan desa. Platform ini memfasilitasi pertukaran informasi teknis, perkembangan penanganan kasus pemanfaatan ruang, serta respon cepat terhadap dinamika dan kondisi lapangan. WhatsApp Group juga membantu dalam penyampaian instruksi teknis, distribusi tugas, serta validasi data secara real-time.

Selain itu, Zoom Meeting turut dimanfaatkan sebagai sarana rapat koordinasi dan pembahasan teknis yang bersifat mendesak maupun terjadwal. Ketika pertemuan tatap muka tidak dapat dilakukan, penggunaan Zoom memastikan proses pembahasan kajian teknis, evaluasi dokumen, maupun penyusunan keputusan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas substansi pembahasan.

Di sisi operasional dan pendataan wilayah, penggunaan GPS memegang peran penting dalam pemetaan koordinat lokasi yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang, baik untuk kepentingan survei, monitoring, maupun validasi lapangan. Teknologi GPS

membantu memperoleh data yang presisi sehingga memudahkan proses analisis dan penentuan langkah kebijakan yang tepat sesuai kondisi nyata di lapangan.

Dengan penerapan teknologi informasi seperti Google Spreadsheet, Google Form, WhatsApp Group, Zoom Meeting, dan GPS, Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten OKI mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik. Implementasi ini memperkuat kolaborasi antarpegawai dan pemangku kepentingan serta mendorong pelayanan penataan ruang yang lebih adaptif, cepat, dan tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi bagian dari langkah modernisasi birokrasi menuju layanan penataan ruang yang berkualitas dan mendukung pembangunan wilayah Kabupaten OKI yang berkelanjutan, tertata, dan sesuai rencana tata ruang yang berlaku.

C. Pengelolaan Tim

Sebagaimana makna kelompok atau tim dalam konteks luas, tim di Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga membangun hubungan kerja yang harmonis, kolaboratif, serta saling mendukung dalam rangka mendorong terjadinya perubahan, pertumbuhan, dan peningkatan kinerja baik secara individu maupun organisasi. Setiap anggota tim memiliki kompetensi yang saling melengkapi dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama melalui prinsip kerja sama, responsibilitas, dan profesionalisme. Kolaborasi yang solid antaranggota tim menjadi kunci dalam mewujudkan visi dan misi penataan ruang yang tertib, terarah, dan berkelanjutan.

Keberhasilan tim diukur melalui kemampuannya menyelesaikan target dan tugas yang telah direncanakan secara tepat waktu, efektif, dan sesuai standar teknis yang berlaku. Dalam konteks ini, tim yang

efektif adalah tim yang mampu bekerja secara optimal dengan menghasilkan output dan outcome yang relevan dengan kebutuhan pengendalian dan perencanaan penataan ruang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemimpin kegiatan (project leader) menerapkan prinsip kepemimpinan partisipatif dengan cara menggerakkan, melibatkan, dan memotivasi seluruh anggota tim. Adapun langkah pengelolaan tim dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Perencanaan Kegiatan dengan Melibatkan Seluruh Tim

- a. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan penataan ruang, termasuk pemetaan sumber daya yang tersedia.
- b. Mengorganisasikan anggota tim dan kapasitas yang dimiliki secara efisien agar mendukung kelancaran proses perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi pemanfaatan ruang.
- c. Melakukan sosialisasi terkait pembagian tugas secara jelas agar setiap anggota memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

2. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Menggerakkan tim sesuai fungsi, keahlian, dan penugasan dalam mendukung pencapaian target perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Menjaga koordinasi yang efektif antaranggota tim terutama pada kegiatan yang saling berkaitan, seperti survei lapangan, pengolahan data, verifikasi administrasi, maupun validasi teknis dokumen.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Melaksanakan monitoring secara berkala untuk melakukan peninjauan perkembangan pekerjaan serta memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.

- b. Mengidentifikasi kendala atau potensi masalah di lapangan dan menyusun solusi alternatif melalui diskusi bersama, termasuk melakukan koreksi kebijakan teknis jika diperlukan.

Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam pengelolaan tim di Bidang Penataan Ruang DPUPR OKI, dimana setiap tahapan kerja tidak hanya berfokus pada hasil tetapi juga proses, sinergi, dan kualitas kontribusi. Pada tahap perencanaan, project leader harus memastikan bahwa kebutuhan dan potensi anggota tim dipetakan secara tepat sehingga dapat dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan program. Pembagian tugas berbasis kompetensi menjadi strategi penting agar setiap pekerjaan ditangani oleh personel yang memiliki keahlian dan pengalaman sesuai bidangnya. Misalnya, anggota dengan kemampuan dalam pemetaan dan analisis data spasial lebih tepat ditugaskan pada kegiatan yang berhubungan dengan sistem informasi geografis (GIS), sementara anggota dengan kompetensi administratif lebih optimal menangani proses dokumentasi dan layanan administrasi.

Setelah struktur dan peran ditetapkan, kepemimpinan project leader berfungsi memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tujuan, serta memastikan seluruh anggota memahami pentingnya program perubahan yang sedang dilakukan. Pemimpin juga harus mampu memupuk motivasi, memberikan apresiasi, dan melakukan komunikasi yang terbuka untuk menjaga komitmen tim. Diskusi rutin, koordinasi aktif, serta evaluasi yang transparan menjadi bagian penting dalam menjaga soliditas tim dan mendorong rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan layanan penataan ruang.

Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan tim di Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten OKI dapat berjalan lebih optimal, terarah, dan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. Penguatan kompetensi anggota, pembagian tugas yang tepat, pengorganisasian yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu

menginspirasi diharapkan mampu mendorong keberhasilan implementasi aksi perubahan menuju tata kelola penataan ruang yang lebih profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan

1. Konsultasi dengan Mentor

Pada minggu ke-3 bulan Oktober 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan konsultasi dengan mentor sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah, kesesuaian, dan implementasi program aksi perubahan yang sedang dijalankan. Kegiatan konsultasi ini diawali dengan menemui serta berdiskusi langsung dengan mentor untuk membahas secara komprehensif konsep, tujuan, substansi, serta rencana aksi dari program yang telah dirancang dalam konteks penataan ruang.

Dalam sesi konsultasi tersebut, project leader meminta dukungan, arahan, dan masukan mendalam dari mentor, baik terkait aspek teknis maupun strategi pelaksanaan, agar setiap tahapan program dapat dijalankan secara sistematis, efektif, serta sesuai regulasi dan standar profesi penataan ruang. Arahan mentor menjadi pedoman strategis bagi project leader dalam melakukan penyesuaian langkah, menyempurnakan metode pelaksanaan, serta memperkuat efektivitas capaian program.



Gambar 3.1 Konsultasi dengan Mentor

Hasil dari konsultasi ini menghasilkan beberapa output penting, yaitu terbitnya Surat Dukungan sebagai bentuk persetujuan dan legitimasi formal dari mentor terhadap program aksi perubahan yang diusulkan, serta dokumentasi kegiatan melalui foto atau video sebagai bukti autentik proses konsultasi. Dokumentasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bagian dari lampiran, referensi, dan bahan evaluasi yang relevan dalam pelaksanaan maupun penilaian keberlanjutan program di masa mendatang.

2. Membentuk Tim Kerja

Pada minggu ke-3 bulan Oktober 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan untuk membentuk tim kerja dalam rangka mendukung implementasi program aksi perubahan yang telah dirancang. Kegiatan ini diawali melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang bertujuan menyamakan persepsi, membangun komitmen, serta merumuskan langkah-langkah pelaksanaan program termasuk penjelasan mengenai tanggung jawab yang akan diemban oleh masing-masing anggota tim.



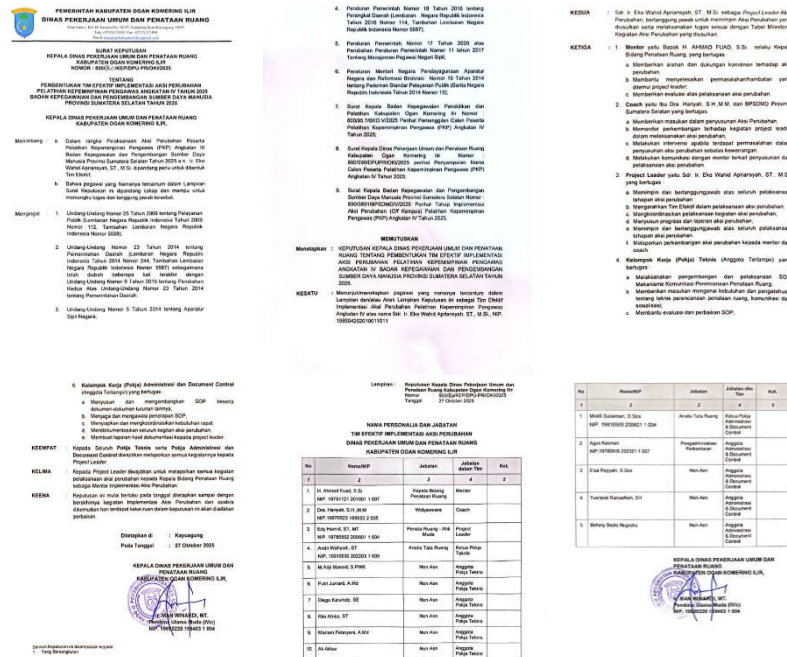
Gambar 3.3 Rapat Koordinasi Tim Efektif

Sebagai hasil dari kegiatan ini, sejumlah output telah disusun dan terdokumentasikan dengan baik, berupa undangan rapat yang memuat agenda dan daftar peserta, daftar hadir sebagai bukti keikutsertaan, notulen rapat yang merangkum poin-poin hasil pembahasan, serta dokumentasi foto sebagai bukti pelaksanaan kegiatan koordinasi. Seluruh output tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi berkelanjutan dalam pelaksanaan program aksi perubahan pada periode berikutnya.

3. Melaksanakan Rapat Persiapan Aksi Perubahan

Pada minggu ke-IV bulan Oktober 2025, dilaksanakan kegiatan rapat persiapan aksi perubahan bersama tim efektif yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penataan ruang di Dinas PUPR Kabupaten OKI. Pada tahap ini, dilakukan serangkaian persiapan berupa penyusunan bahan rapat, pengiriman undangan kepada peserta, serta penyediaan daftar hadir untuk memastikan peserta yang terlibat tercatat dengan baik. Rapat kemudian dilaksanakan secara efektif dan terarah guna menyamakan langkah serta memperkuat koordinasi internal, khususnya terkait strategi, mekanisme, dan

alur kerja program agar dapat berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.



Gambar 3.4 SK Tim Efektif

Selain itu, kegiatan pada milestone ini juga mencakup penyampaian Surat Keputusan (SK) tim efektif sebagai dasar legal formal bagi anggota tim untuk menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Melalui penyampaian SK tersebut, dilakukan pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas agar setiap anggota memiliki fokus kerja sesuai kompetensi dan kontribusinya. Untuk mendukung akuntabilitas serta pelaporan kegiatan, disusun dokumen pendukung berupa surat undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat, serta dokumentasi berupa foto atau video. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan internal sebelum memasuki tahapan implementasi langsung kepada masyarakat.

4. Menyiapkan Dokumen-Dokumen yang Dibutuhkan Untuk Mendukung Aksi Perubahan

Pada minggu ke-1 bulan November 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan penyusunan serta persiapan dokumen-dokumen penting, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP), yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi program aksi perubahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional, teknis, serta prosedural program dapat dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan sesuai standar pelayanan di bidang penataan ruang.

Proses penyusunan diawali dengan pembuatan dokumen kebutuhan program yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan aksi perubahan. Dokumen SOP dirumuskan secara rinci, mencakup alur proses kerja, peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, serta mekanisme koordinasi yang harus diikuti oleh seluruh anggota tim maupun stakeholder terkait.



Gambar 3.5 Dokumen SOP Mekanisme Komunikasi Perencanaan Penataan Ruang

Dokumen yang telah disahkan kemudian didistribusikan kepada unit atau pihak terkait disertai dengan sosialisasi singkat agar seluruh anggota tim memahami ketentuan, tahapan, serta tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini menghasilkan beberapa output utama, yaitu dokumen SOP yang telah disahkan, lembar serah terima sebagai bukti distribusi dokumen kepada masing-masing pihak terkait, serta foto dokumentasi yang merekam proses sosialisasi dan distribusi. Dengan langkah ini, project leader memastikan kesiapan dokumen pendukung sebagai landasan pelaksanaan program aksi perubahan secara efektif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Sosialisasi dan Implementasi SOP

Pada minggu ke-1 bulan November 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun untuk mendukung program aksi perubahan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki pemahaman yang selaras, serta mampu menerapkan prosedur secara efektif dalam setiap proses kerja di bidang penataan ruang.

Kegiatan diawali dengan penegasan kembali mengenai pengesahan dokumen SOP yang berisi pengaturan operasional, mekanisme koordinasi, dan tata alur kerja yang telah disesuaikan dengan tujuan program aksi perubahan. Setelah dokumen dinyatakan sah, project leader mendistribusikan SOP kepada pihak atau unit terkait dan memberikan penjelasan terperinci mengenai langkah-langkah implementasi, peran masing-masing pegawai, serta tanggung jawab dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Sosialisasi diselenggarakan melalui sesi diskusi dan tanya jawab untuk memastikan setiap pegawai memahami dan mampu mengimplementasikan SOP secara tepat serta konsisten.



Gambar 3.6 Sosialisasi SOP

BUKTI SERAH TERIMA DISTRIBUSI DOKUMEN

Dokumen : SOP Analisis Ruang
Bidang : Perencanaan Ruang

No	Nama	Bidang	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Alimatus Fikri	Perencanaan Ruang	Kepala Bidang	[Signature]
2	Rizki I R	Perencanaan Ruang	Ka. Bina	[Signature]
3	M. B. Nurhadi	-	Ka. Bina	[Signature]
4	A. Tanti	-	Bendahara	[Signature]
5	Sari A. N.	Perencanaan Ruang	Ka. Bina	[Signature]
6	Gusman	OPD Ruang	Kasir	[Signature]

Gambar 3.7 Lembar Distribusi Dokumen

Hasil dari kegiatan ini menghasilkan beberapa output yang terdokumentasi, yaitu dokumen SOP beserta formulir pendukung pelaksanaannya, lembar serah terima sebagai bukti distribusi dokumen kepada unit atau pihak terkait, serta foto

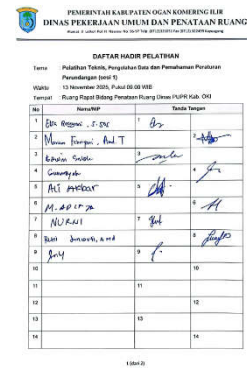
dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Melalui kegiatan ini, project leader berharap seluruh pegawai dapat menerapkan SOP dengan baik sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan program aksi perubahan secara terukur, terarah, dan berkelanjutan.

6. Pelatihan SDM secara Internal

Pada minggu ke-II bulan November 2025, dilaksanakan kegiatan pelatihan internal bagi SDM yang terlibat dalam proses evaluasi pemanfaatan lahan di Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten OKI. Tahapan awal kegiatan ini dimulai dengan pembuatan surat undangan pelatihan serta daftar hadir peserta untuk memastikan seluruh pihak yang relevan dapat mengikuti pelatihan secara resmi dan tercatat. Persiapan tersebut dilakukan sebagai langkah administratif sekaligus bentuk penegasan bahwa kegiatan pelatihan merupakan bagian penting dari rangkaian aksi perubahan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, pemahaman, dan kesiapan aparatur dalam mendukung peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan tata ruang.



Gambar 3.8 Pelatihan Pegawai



Gambar 3.9 Undangan Pelatihan, Daftar Hadir

Pelatihan kemudian dilaksanakan secara langsung dengan metode penyampaian materi, diskusi, serta studi kasus sederhana yang relevan dengan proses evaluasi pemanfaatan lahan, sehingga peserta tidak hanya memahami teori namun juga mampu mengimplementasikannya pada konteks tugas sehari-hari. Melalui pelaksanaan pelatihan ini, dihasilkan beberapa dokumen pendukung berupa surat undangan pelatihan, daftar hadir, laporan hasil pelatihan, serta dokumentasi foto atau video sebagai bukti capaian milestone. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM internal dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai sebelum melakukan interaksi dan fasilitasi kepada masyarakat dalam tahap implementasi kebijakan tata ruang.

7. Update Data Berbasis Cloud

Pada minggu ke-II bulan November 2025, dilakukan kegiatan update data berbasis cloud sebagai bagian dari upaya penguatan sistem informasi dan koordinasi internal dalam mendukung implementasi aksi perubahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penataan ruang. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur Google

Spreadsheet sebagai media penyimpanan dan pembaruan data secara real-time, sehingga setiap anggota tim dapat melihat perkembangan data, memberikan masukan, serta memantau hasil pekerjaan tanpa terhambat oleh lokasi dan waktu. Pemanfaatan sistem berbasis cloud ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, mempercepat proses kerja, serta menghindari adanya data yang tercecer, hilang, atau tidak sinkron antaranggota tim.



Gambar 3.10 Tim Efektif Melakukan Update Data Via Google Spreadsheet

 The screenshot shows a web form titled "DPUPR OKI - FORM ASPIRASI PENATAAN RUANG". Below the title is a brief description in Indonesian. The form contains four input fields, each with a label and a placeholder text: "Nama" (placeholder: Masukkan Nama), "Email" (placeholder: Masukkan Email), "Alamat" (placeholder: Masukkan Alamat), and "Nomor atau Angkasan" (placeholder: Masukkan No). At the bottom of the form, there is a "Kirim" button and a "Klik disini untuk lebih lanjut" link.

Gambar 3.11 Formulir Google untuk Penyampaian Aspirasi Masyarakat

Selain itu, untuk memperkuat efektivitas komunikasi dan koordinasi, dibuat grup WhatsApp internal yang berfungsi sebagai jalur komunikasi cepat, sehingga setiap informasi, instruksi, atau update perubahan dapat tersampaikan secara langsung dan terdokumentasi dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan proses pengecekan ulang (updating) terhadap seluruh data yang telah terinput guna memastikan akurasi, konsistensi, serta kesesuaian antara data lapangan dan data sistem. Bukti pelaksanaan kegiatan berupa Google Spreadsheet, tangkapan layar grup WhatsApp, serta dokumentasi foto atau video disiapkan sebagai lampiran laporan dan verifikasi capaian milestone. Melalui kegiatan ini, tim diharapkan memiliki sistem komunikasi dan database yang lebih modern, terintegrasi, dan mendukung budaya kerja kolaboratif serta responsif.

8. Pengumpulan Feedback dari Setiap Stakeholder yang Terlibat

Pada minggu ke III bulan November 2025, project leader dari Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan kegiatan pengumpulan feedback dari para stakeholder yang terlibat dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terbaru. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi implementasi SOP untuk menilai tingkat efektivitasnya serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan penyempurnaan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bidang Penataan Ruang secara lebih optimal.

Pengumpulan feedback dilakukan dengan menggunakan formulir elektronik melalui Google Form, sehingga seluruh stakeholder dapat menyampaikan pendapat, pengalaman, dan masukan secara mudah, cepat, serta terstandar. Pertanyaan pada formulir meliputi penilaian terhadap kemudahan penerapan SOP, hambatan atau kendala yang dirasakan selama proses pelaksanaan, serta saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas SOP. Metode ini dipilih agar diperoleh data dan perspektif yang komprehensif dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penataan ruang.

Gambar 3.12 Formulir Feedback Penerapan SOP

Setelah seluruh masukan terkumpul, project leader melakukan proses rekapitulasi dan analisis terhadap hasil tanggapan. Analisis tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dan kenyamanan stakeholder terhadap SOP, sekaligus menyoroti poin-poin yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas penataan ruang. Output dari kegiatan ini meliputi tautan Google Form yang digunakan dalam pengumpulan data, rekap hasil feedback, serta foto dokumentasi kegiatan. Melalui tahapan ini, project leader berharap SOP yang diterapkan dapat lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan di lapangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

B. Manfaat Aksi Perubahan

Tabel 3.1 Manfaat Aksi Perubahan

Aspek	Sebelum Implementasi	Sesudah Implementasi
Efektivitas	- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang rendah. - Informasi terkait rencana tata ruang kurang tersampaikan sehingga aspirasi belum sepenuhnya terserap.	- Mekanisme konsultasi dan partisipasi masyarakat berjalan lebih efektif melalui sistem terstruktur. - Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam perumusan rekomendasi penataan ruang.
Transparansi	- Informasi tata ruang tidak terpublikasi secara terbuka kepada masyarakat. - Proses pengambilan keputusan cenderung bersifat internal sehingga transparansi masih terbatas.	- Website/Google Form/Media publikasi digunakan untuk membuka akses informasi secara luas. - Masyarakat dapat melihat informasi dan perkembangan proses penataan ruang secara transparan.
Dokumentasi	- Usulan dan catatan aspirasi masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik, rawan hilang, atau tidak tersimpan secara sistematis.	- Rekap data partisipasi masyarakat terdokumentasi digital dan tersimpan dalam database online, sehingga mudah

		diakses dan direview.
Koordinasi Antar Bidang	- Komunikasi antara perangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat kurang komprehensif. - Proses koordinasi membutuhkan waktu lama karena pertemuan dilakukan secara konvensional.	- Komunikasi dan koordinasi lebih cepat melalui grup komunikasi digital (WhatsApp/Forum Diskusi Online). - Kolaborasi lintas pihak semakin terbangun dalam penyusunan rencana tata ruang.
Kinerja Pegawai	- Tingkat pemahaman masyarakat terkait tata ruang rendah. - Masyarakat hanya mengetahui pelaksanaan tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan.	- Edukasi dan sosialisasi meningkatkan wawasan serta kepedulian masyarakat. - Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, memberikan masukan, dan turut mengawasi pelaksanaan penataan ruang.

Pelaksanaan aksi perubahan yang berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penataan ruang di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir telah memberikan sejumlah manfaat nyata, baik secara internal kelembagaan maupun bagi masyarakat sebagai penerima manfaat

akhir. Sebelum aksi perubahan diimplementasikan, partisipasi publik dalam penyusunan rencana penataan ruang masih tergolong rendah, disebabkan oleh minimnya akses informasi, belum tersedianya sarana penyampaian aspirasi yang mudah, serta kurangnya koordinasi antara unsur pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penyusunan rencana tata ruang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan, kondisi, dan aspirasi wilayah setempat.

Dengan adanya aksi perubahan ini, pendekatan yang diterapkan menjadi lebih inklusif dan kolaboratif melalui penyediaan mekanisme konsultasi publik yang terstruktur, pemanfaatan platform digital sebagai media penyampaian informasi, serta peningkatan dokumentasi aspirasi secara sistematis. Implementasi sistem berbasis digital dan prosedur yang lebih jelas telah meningkatkan efektivitas penyampaian dan penyerapan aspirasi masyarakat, sehingga rencana penataan ruang dapat disusun secara lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan lapangan.

Selain meningkatkan efektivitas, aksi perubahan ini turut mendorong transparansi melalui keterbukaan informasi publik mengenai tahapan perencanaan tata ruang, di mana masyarakat dapat mengakses perkembangan proses perencanaan melalui dukungan media digital. Dokumentasi aspirasi kini tersusun lebih baik melalui penyimpanan data berbasis cloud, sehingga memudahkan proses pelacakan, verifikasi, serta evaluasi di masa mendatang.

Dari aspek koordinasi, program ini berhasil memperkuat komunikasi antara pemangku kepentingan melalui pemanfaatan kanal komunikasi digital, sehingga koordinasi dapat dilakukan lebih cepat dan responsif. Tidak hanya berdampak pada proses internal, aksi perubahan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya perencanaan tata

ruang, sehingga keterlibatan mereka menjadi semakin aktif dan konstruktif dalam proses penyusunan kebijakan.

Secara keseluruhan, aksi perubahan ini tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui prinsip transparansi, kolaborasi, serta akuntabilitas. Ke depan, hasil dari aksi perubahan ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam perencanaan penataan ruang di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Guna memperkuat dukungan dari semua pihak, project leader menerapkan pendekatan persuasif untuk meningkatkan minat dan partisipasi pegawai. Misalnya, sebelum pelatihan dimulai, project leader mengadakan sesi diskusi informal bersama kepala bidang dan beberapa pegawai senior untuk menjelaskan manfaat pelatihan dan bagaimana kemampuan baru ini akan memudahkan pekerjaan harian mereka. Langkah ini terbukti berhasil dalam menarik perhatian pegawai, dan beberapa pegawai bahkan memberikan testimoni tertulis mengenai ketertarikan mereka untuk mengikuti pelatihan.

Adapun rekap hasil pelatihan dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Kebutuhan Pelatihan Bagi Pihak Terdampak

No	Pihak Terdampak	Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan
1	Tim Perencanaan Bidang Penataan Ruang	Kemampuan pemahaman, prosedur dan peraturan perundangan serta pemahaman terkait tata ruang.	Pelatihan yang Diperlukan: Pelatihan Teknis dan Pemahaman Peraturan Perundangan

2	Bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. OKI	Keterampilan koordinasi dan komunikasi antar tim dan kemampuan mengolah data yang berbasis cloud	In house Training untuk melatih Koordinasi Tim dan Pengelolaan Data.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan aksi perubahan di bidang penataan ruang, dapat diidentifikasi bahwa terdapat dua pihak utama yang memerlukan peningkatan kompetensi guna mendukung keberhasilan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang. Dua pihak tersebut adalah Tim Perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keduanya memiliki peran penting dalam tahapan teknis maupun administratif, serta menjadi garda terdepan dalam memastikan informasi, prosedur, dan regulasi tata ruang dapat dipahami, dijalankan, dan disosialisasikan secara tepat kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

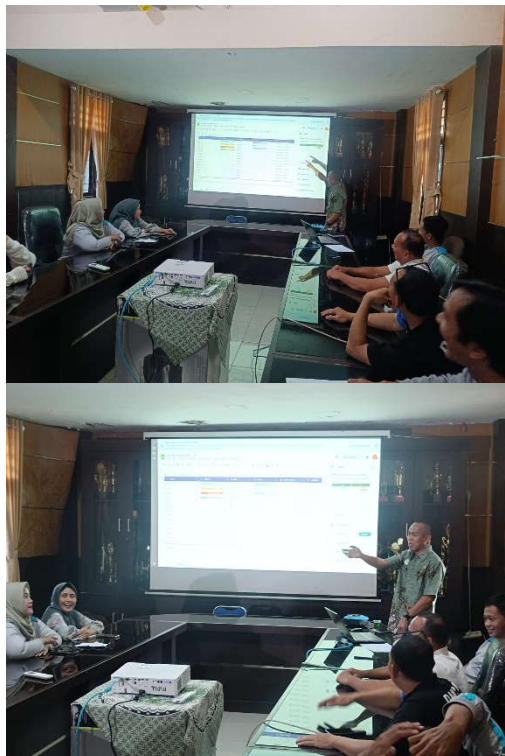
Untuk Tim Perencanaan Bidang Penataan Ruang, kompetensi utama yang dibutuhkan mencakup kemampuan memahami prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang. Hal ini menjadi sangat penting karena setiap tahapan perencanaan yang disusun harus sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah dan dokumen rencana lainnya. Selain itu, pemahaman teknis tentang perencanaan, penataan ruang, serta metodologi pengumpulan dan analisis data juga perlu diperkuat agar hasil perencanaan bersifat akurat, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai upaya pengembangan kemampuan tersebut, diperlukan pelatihan teknis dan pemahaman regulasi yang dapat dilakukan melalui pelatihan formal, workshop, bimtek, maupun transfer knowledge melalui studi kasus atau diskusi kelompok. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tim dalam menyusun dokumen perencanaan, melakukan kajian, serta memahami proses sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan tata ruang, sehingga implementasi perencanaan dapat memberikan dampak positif yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sementara itu, untuk Bidang Penataan Ruang DPUPR Kabupaten OKI, kompetensi yang perlu ditingkatkan berfokus pada keterampilan koordinasi, komunikasi lintas tim, serta pengelolaan data berbasis teknologi cloud. Hal ini bertujuan agar alur komunikasi internal maupun eksternal menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus mendukung penyajian data yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan melalui in house training yang disusun secara sistematis, meliputi pelatihan kolaborasi kerja tim, penggunaan aplikasi data berbasis digital, hingga simulasi pengelolaan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan.



Gambar 3.13 Pelatihan Teknis, Pengolahan Data dan Pemahaman Peraturan Perundangan (Sesi 1)



Gambar 3.14 Pelatihan Komunikasi dan Koordinasi (Sesi 2)

DAFTAR HADIR PELATIHAN
Tema : Pelatihan Teknis, Pengisian Data dan Pemahaman Peraturan
Perundangan (sesi 1)
Waktu : 13 November 2025, Pukul 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kab. OKI

No	Nama/NIP	Tanda Tangan
1	Bek Rasyad, S.SW	1
2	Maman Feryani, And T	2
3	Bowin Gubek	3
4	Gumayda	4
5	Ali Albasat	5
6	M. ADIT	6
7	NURAIL	7
8	Bati Jansari, A.Md	8
9	Inti	9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14

DAFTAR HADIR PELATIHAN
Tema : Pelatihan Komunikasi dan Koordinasi (sesi 2)
Waktu : 13 November 2025, Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kab. OKI

No	Nama/NIP	Tanda Tangan
1	Bek Rasyad, S.SW	1
2	Maman Feryani, And T	2
3	NUP-NI	3
4	KIRULAH	4
5	Bowin Gubek	5
6	Ali Albasat	6
7	M. ADIT	7
8	Bati Jansari, A.Md	8
9	Inti	9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14

Gambar 3.15 Daftar Hadir Pelatihan Sesi 1 dan Sesi 2

BAB IV

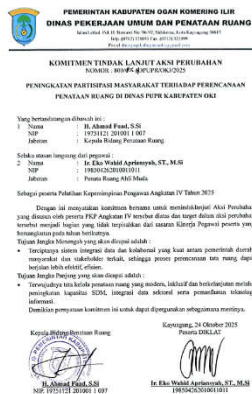
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek

Pada jangka pendek, tindak lanjut kegiatan difokuskan pada penguatan dasar pelaksanaan program melalui konsultasi mentor, pembentukan tim, serta koordinasi internal melalui rapat persiapan aksi perubahan. Tujuan utama pada tahap ini adalah memastikan arah program telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, peraturan yang berlaku, serta strategi pelaksanaan yang realistis dan terukur. Selain itu, legitimasi program diperkuat melalui keluarnya surat dukungan dan surat keputusan pembentukan tim, yang menjadi dasar formal dalam pelaksanaan aksi perubahan.

Selanjutnya, dilakukan penyiapan dokumen-dokumen pendukung berupa SOP dan instrumen kerja lainnya yang menjadi pedoman baku dalam implementasi program. Kegiatan ini melibatkan penyusunan alur kerja, peran dan tanggung jawab pihak terkait, hingga mekanisme koordinasi sehingga seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Setelah SOP selesai disusun, dokumen tersebut disahkan oleh pihak berwenang agar memiliki kekuatan regulatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap jangka pendek kemudian diakhiri dengan pelaksanaan sosialisasi SOP kepada seluruh pegawai terkait guna memastikan kesamaan pemahaman dan komitmen pelaksanaan. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta memahami peran masing-masing. Dengan demikian, jangka pendek berfungsi sebagai fondasi awal agar seluruh perangkat pelaksanaan program siap baik secara administratif, regulatif, maupun teknis operasional.



Gambar 4.1 Komitmen Tindak lanjut Aksi Perubahan

B. Penetapan Target Jangka Menengah dan Jangka Panjang

1. Jangka Menengah (6 bulan s/d 1 tahun)

Pada jangka menengah, tindak lanjut kegiatan diarahkan pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan internal yang relevan dengan tugas evaluasi pemanfaatan ruang serta pemrosesan data berbasis digital. Pelatihan diselenggarakan

untuk memastikan seluruh anggota tim memiliki kemampuan teknis dan analitis yang memadai dalam menangani data, menyusun rekomendasi kebijakan, serta memahami dinamika pelaksanaan program berbasis partisipasi masyarakat. Output dari tahap ini diharapkan mampu memperkuat kualitas SDM yang menjadi motor penggerak implementasi SOP.

Selain peningkatan kompetensi, jangka menengah juga berfokus pada penerapan sistem kerja berbasis cloud menggunakan Google Spreadsheet dan integrasi komunikasi digital melalui WhatsApp Group. Sistem berbasis cloud akan menciptakan transparansi kerja, percepatan pembaruan data, serta meminimalkan risiko kehilangan informasi. Penggunaan platform komunikasi digital mendukung percepatan koordinasi, dokumentasi percakapan, serta penyampaian informasi penting secara efektif dan efisien.

Tahap jangka menengah juga menjadi masa evaluasi periodik awal terhadap implementasi SOP, baik dari sisi teknis maupun perilaku kerja aparatur. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil data aktivitas tim, capaian output, serta umpan balik internal yang muncul dalam proses pelaksanaan program. Dengan demikian, jangka menengah tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan dan sistem kerja, tetapi juga menjadi fase untuk memonitor konsistensi, kedisiplinan, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Jangka Panjang (1 tahun s/d 2 tahun)

Pada jangka panjang, tindak lanjut program diarahkan kepada upaya evaluasi menyeluruh melalui pengumpulan feedback dari para stakeholder yang terlibat maupun terdampak terhadap implementasi SOP. Sistem evaluasi ini

dilakukan menggunakan instrumen digital berbasis kuesioner online agar diperoleh data yang objektif, efisien, serta terdokumentasi dengan baik. Data feedback digunakan untuk menilai keterpakaian SOP, keefektifan langkah yang diterapkan, hambatan yang muncul, serta rekomendasi penyesuaian dalam rangka perbaikan kebijakan penataan ruang yang lebih adaptif.

Tahap jangka panjang juga difokuskan untuk melakukan revisi dan penyempurnaan SOP berdasarkan masukan evaluatif, kebijakan pemerintah terbaru, serta perkembangan dinamika kebutuhan masyarakat dalam konteks tata ruang. Dengan demikian, dokumen SOP tidak bersifat statis, tetapi menjadi living document yang selalu dapat diperbarui. Konsistensi pemutakhiran SOP ini akan mendukung profesionalisme kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis penataan ruang.

Lebih jauh lagi, pada jangka panjang direncanakan pengembangan sistem informasi penataan ruang berbasis digital yang lebih komprehensif sehingga data, proses evaluasi, penyampaian informasi, dan partisipasi masyarakat dapat diakses secara transparan dan berkelanjutan. Di akhir fase, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari selesai tidaknya dokumen maupun pelaksanaan kegiatan, tetapi dari tercapainya budaya kerja baru yang adaptif, kolaboratif, berbasis teknologi, dan memiliki orientasi pelayanan publik jangka panjang.

BAB V

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

A. Rangkuman Pemilihan Mata Pelatihan Pilihan dalam Mendukung Aktualisasi Kepemimpinan PKP

Kegiatan yang dilakukan oleh project leader dalam aksi perubahan ini memiliki keterkaitan erat dengan materi-materi yang diperoleh selama pelatihan Diklat. Dengan mengintegrasikan teori yang dipelajari selama Diklat ke dalam praktik, project leader dapat mengoptimalkan implementasi perubahan ini dan memastikan keberhasilan proyek yang berkelanjutan.

Adapun rangkuman beberapa mata pelatihan yang memiliki keterkaitan erat dengan aksi perubahan ini yaitu:

Tabel 5.1 Rangkuman Mata Pelatihan Terkait dengan Aksi Perubahan

No	Judul AksiPerubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Penataan Ruang Di Dinas PUPR Kabupaten OKI	Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja	Daring	1. Konsultasi dengan Atasan: Project leader secara aktif berkonsultasi dengan mentor dan atasan untuk mendapatkan arahan, memastikan keputusan sesuai dengan visi organisasi, serta membangun hubungan yang baik melalui komunikasi dua arah yang jelas. 2. Memimpin Rapat Tim: Project leader

				mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi dan mengajak diskusi terbuka, memastikan semua anggota tim terlibat dalam komunikasi yang konstruktif dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. 3. Distribusi dan Penerapan SOP: Dalam mendistribusikan SOP, project leader memastikan anggota tim memahami prosedur dengan jelas, menggunakan komunikasi efektif untuk menjelaskan peran dan mengatasi hambatan dalam implementasi standar kerja.
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Penataan Ruang Di Dinas PUPR Kabupaten OKI	Membina Kerjasama Tim	Daring	1. Memimpin Rapat Tim yang Efektif: Project leader menciptakan suasana rapat yang terbuka dan produktif, mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota, memastikan tujuan yang jelas, dan memberikan kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan masukan. Ini

				memperkuat komunikasi, membangun rasa saling percaya, dan memotivasi kolaborasi yang erat untuk mencapai tujuan bersama.
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Penataan Ruang Di Dinas PUPR Kabupaten OKI	Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan	Daring	1. Pemanfaatan Google Spreadsheet yang berfungsi sebagai media pembaruan data secara real-time sehingga memudahkan seluruh pihak yang terlibat dalam melihat progres kegiatan secara cepat dan akurat. 2. Grup WhatsApp dan Google Form sebagai sarana koordinasi serta pengumpulan umpan balik secara efektif, sehingga informasi yang diperlukan dapat tersampaikan secara cepat, terdokumentasi, serta memungkinkan proses evaluasi dilakukan dengan lebih sistematis.

Untuk lebih memahami adanya keterkaitan yang erat antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh project leader dalam melaksanakan aksi perubahan maka akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

B. Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja

Pada mata pelatihan “Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja”, dijelaskan bahwa pembelajaran tersebut memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan aksi perubahan melalui tiga

bentuk praktik kepemimpinan yang diterapkan oleh project leader. Pertama, kemampuan melakukan konsultasi dan komunikasi intensif dengan atasan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan menjadi langkah penting untuk memastikan keselarasan arah kebijakan dengan visi organisasi. Kedua, project leader mengembangkan kemampuan memimpin rapat secara efektif, di mana rapat bukan hanya berlangsung formal tetapi juga bersifat partisipatif, terbuka, dan menghasilkan keputusan yang jelas. Ketiga, pembelajaran ini berperan dalam memperkuat kemampuan menyampaikan, mendistribusikan, serta mengimplementasikan SOP secara jelas kepada seluruh anggota tim, sehingga setiap personel mengetahui peran, tugas, dan target yang harus dicapai.

Pembelajaran dari mata pelatihan ini menekankan bahwa komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kepemimpinan, terutama ketika memimpin sebuah perubahan di lingkungan birokrasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik tidak hanya membantu menyamakan persepsi, namun juga meningkatkan rasa kepemilikan, keterlibatan, dan komitmen seluruh anggota tim. Komunikasi yang efektif juga menjadi sarana penyelesaian persoalan di lapangan, mengurangi risiko salah interpretasi, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling mendukung. Dengan demikian, kompetensi komunikasi kerja yang diperoleh dalam pelatihan ini mampu memberikan dampak langsung terhadap keberhasilan implementasi aksi perubahan yang sedang dilaksanakan.

C. Membangun Kerjasama Tim

Selanjutnya, pada mata pelatihan “Membina Kerjasama Tim”, hubungan pembelajaran dengan aksi perubahan diwujudkan melalui peningkatan kemampuan project leader dalam mengelola tim secara lebih strategis dan kolaboratif. Pembelajaran ini mengajarkan metode membangun suasana kerja yang kondusif, memfasilitasi komunikasi

yang terbuka, serta memastikan seluruh anggota tim memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide, masukan, dan sudut pandang. Selain itu, kemampuan memimpin rapat tim secara efektif menjadi salah satu wujud implementasi pelatihan, di mana project leader tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang memastikan jalannya diskusi berlangsung dua arah, fokus, efisien, serta menghasilkan keputusan dan tindak lanjut yang jelas.

Pembelajaran ini secara langsung memperkuat kapasitas project leader dalam mengelola dinamika kerja tim, termasuk bagaimana mengantisipasi perbedaan pendapat, mengurangi potensi konflik, dan menumbuhkan rasa saling percaya antaranggota. Dengan mendorong partisipasi aktif dan rasa memiliki terhadap program perubahan, setiap anggota tim dapat bekerja secara kooperatif dan saling mendukung untuk mencapai target aksi perubahan yang telah ditetapkan. Kemampuan membina kerjasama tim ini pada akhirnya menjadi modal penting bagi leader dalam menciptakan budaya kerja yang harmonis, produktif, serta berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

D. Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan

Kemudian, pada mata pelatihan “Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan”, hubungan pembelajaran dengan aksi perubahan terlihat dari kemampuan project leader dalam menerapkan teknologi digital sebagai pendukung utama proses kerja. Implementasi Google Spreadsheet sebagai media pembaruan data berbasis cloud secara real-time menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keterbukaan akses data, mempermudah kolaborasi, serta memastikan setiap informasi dapat diperbaharui dan dipantau kapan saja tanpa batasan tempat. Hal ini memungkinkan semua anggota tim, termasuk pejabat terkait, untuk mengamati progres

pelaksanaan kegiatan secara cepat, akurat, dan transparan, sekaligus meminimalisir risiko kehilangan data atau ketidaksinkronan informasi antaranggota.

Selain itu, pemanfaatan WhatsApp Group dan Google Form turut memperkuat efektivitas komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan aksi perubahan. WhatsApp Group digunakan sebagai media komunikasi cepat antaranggota tim untuk menyampaikan informasi, instruksi, dan pembaruan kegiatan secara fleksibel, sedangkan Google Form dimanfaatkan untuk mengumpulkan data, aspirasi, maupun umpan balik dari berbagai pihak dengan cara yang praktis serta terdokumentasi otomatis. Melalui penerapan teknologi ini, proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih sistematis, efisien, serta mampu mencerminkan karakter pelayanan publik modern yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Penggunaan transformasi digital tersebut diharapkan tidak hanya efektif dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan, tetapi juga dapat menjadi standar kerja keberlanjutan bagi organisasi dalam menghadapi perkembangan tuntutan pelayanan berbasis digital.

BAB VI

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

1. Strategi komunikasi pada stakeholder primer dan internal

Strategi komunikasi pada stakeholder primer dan internal meliputi Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas PUPR, dan Kepala Bidang Penataan Ruang yang menjadi pengambil keputusan dan pemberi arahan utama dalam pelaksanaan aksi perubahan. Komunikasi dilakukan secara langsung, formal, terjadwal, dan penuh pertanggungjawaban melalui rapat koordinasi berkala, penyampaian laporan perkembangan, dan konsultasi teknis, sehingga setiap langkah dapat disetujui dan dikawal sesuai visi, kebijakan, serta target organisasi. Pendekatan komunikasi yang digunakan adalah direct instruction, konsultatif, dan kolaboratif agar pimpinan tetap memiliki kendali arah perubahan tetapi sekaligus memberikan ruang refleksi dan pertimbangan strategis.

2. Strategi komunikasi kepada stakeholder sekunder dan internal

Selanjutnya, strategi komunikasi kepada stakeholder sekunder dan internal, yaitu Bidang Perencanaan, dilakukan melalui koordinasi teknis menggunakan pola komunikasi informational sharing dan integrative collaboration. Komunikasi dilaksanakan melalui rapat teknis, korespondensi dokumen, serta pemanfaatan platform digital seperti Google Spreadsheet dan WhatsApp Group. Tujuannya untuk memastikan bahwa data, rencana kegiatan, dan pelaksanaan program dapat saling mendukung, selaras dengan sistem perencanaan daerah, serta

terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang menjadi rujukan formal pemerintah.

3. Strategi komunikasi kepada stakeholder primer dan eksternal

Untuk stakeholder primer dan eksternal, yaitu Camat, Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat, strategi komunikasi dilakukan secara dialogis, persuasif, dan partisipatif untuk mendorong keterlibatan aktif dalam perencanaan tata ruang. Komunikasi dilaksanakan melalui forum diskusi warga, sosialisasi lapangan, penyebaran informasi secara sederhana, serta penerapan metode two-way communication agar umpan balik, aspirasi, dan kebutuhan lokal dapat terakomodasi. Pola komunikasi ini menekankan pada hubungan kemitraan dan kolaborasi, bukan sekadar penyampaian informasi sepihak.

4. Strategi komunikasi kepada stakeholder sekunder dan eksternal

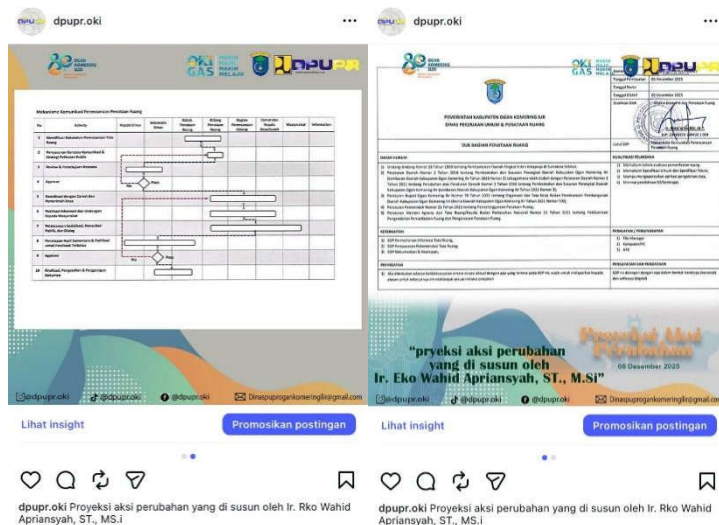
Bagi stakeholder sekunder dan eksternal, yaitu asosiasi profesi, LSM, dan media, strategi komunikasi dilakukan dengan pendekatan informasi terbuka, profesional, dan edukatif. Bentuk komunikasi dapat berupa konferensi kecil, rilis informasi publik, publikasi digital, maupun undangan kolaborasi sesuai bidang kompetensi mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan, menghindari misinformasi, serta membuka ruang evaluasi independen, namun tetap menjaga posisi organisasi sebagai lembaga resmi pemerintah.

5. Strategi komunikasi kepada stakeholder utama dan eksternal

Terakhir, untuk stakeholder utama dan eksternal, yaitu Kantor Pertanahan atau ATR/BPN, strategi komunikasi dilakukan melalui pendekatan formal, koordinatif, dan berbasis regulasi, mengingat kerja sama ini berkaitan erat dengan kewenangan hukum pemanfaatan dan status lahan. Komunikasi dilakukan melalui nota dinas, pertemuan lintas instansi, pertukaran data resmi, dan sinkronisasi dokumen perencanaan. Target komunikasi adalah memastikan kesesuaian kebijakan tata ruang daerah dengan regulasi pertanahan nasional serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

B. Publikasi

Publikasi aksi perubahan dilakukan melalui akun resmi Instagram Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai salah satu media informasi publik yang mudah diakses, cepat, dan memiliki jangkauan audiens yang luas. Melalui unggahan konten publikasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui bahwa sedang dilaksanakan sebuah program inovasi bertema Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Penataan Ruang, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi, dan pelibatan warga dalam proses pembangunan wilayah. Konten yang dipublikasikan memuat pesan inti mengenai tujuan aksi perubahan, manfaat bagi masyarakat, serta ajakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perencanaan tata ruang.



Gambar 6.1 SOP Mekanisme Komunikasi Perencanaan Penataan Ruang di Upload pada Media Sosial Dinas PUPR

Selain sebagai bentuk penyebaran informasi, publikasi di Instagram ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik dan dokumentasi digital resmi kegiatan. Penyampaian informasi melalui media sosial dinilai lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan pola komunikasi masyarakat saat ini yang cenderung mengakses informasi melalui perangkat digital. Dengan adanya publikasi ini, diharapkan tercipta peningkatan awareness, munculnya interaksi atau umpan balik dari masyarakat, serta terbentuknya citra positif organisasi yang modern, responsif, dan komunikatif dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Publikasi ini juga menjadi bagian dari bukti transparansi kinerja organisasi terkait upaya pemerintah dalam mewujudkan tata ruang yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

C. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan

Keberhasilan aksi perubahan tidak hanya ditunjukkan melalui tercapainya target kegiatan internal, namun juga dibuktikan dengan adanya dukungan nyata dari para stakeholder untuk melakukan

adopsi atau replikasi program. Dalam proses pelaksanaannya, aksi perubahan yang berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan penataan ruang ini dinilai memberikan manfaat strategis bagi organisasi serta masyarakat, karena mampu menghadirkan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka, terukur, dan berbasis kolaborasi. Melalui berbagai forum koordinasi, rapat lintas sektor, serta penyampaian hasil implementasi secara transparan, para stakeholder menilai bahwa inovasi ini memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas perencanaan tata ruang, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat efektivitas pelayanan pemerintah.

Dukungan adopsi atau replikasi juga muncul karena kesesuaian inovasi dengan kebutuhan kerja serta kemudahan dalam penerapan, baik dari sisi prosedur, sumber daya, maupun teknologi yang digunakan. Stakeholder internal maupun eksternal menyatakan kesiapan dan ketertarikan untuk melanjutkan atau memperluas penggunaan metode yang telah dikembangkan, seperti pemanfaatan media digital untuk pembaruan data, mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih terstruktur, serta pola komunikasi kolaboratif lintas sektor. Komitmen ini menjadi indikator keberhasilan transformasi, bahwa aksi perubahan tidak hanya bermanfaat sebagai kegiatan jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi model kerja berkelanjutan dan berpotensi diterapkan pada unit atau daerah lain sebagai bentuk replikasi inovasi pelayanan publik.

Gambaran mengenai adanya pergeseran pada peta analisa stakeholders ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 6.2 Peta Analisa Stake Holders Sebelum Kegiatan Aksi Perubahan



Gambar 6.3 Peta Analisa Stakeholders Setelah Aksi Perubahan Dilaksanakan

BAB VII

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

1. Integritas

Pelaksanaan aksi perubahan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan sikap perilaku kepemimpinan berbasis integritas, di mana nilai kejujuran, komitmen moral, serta konsistensi dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan menjadi semakin kuat dan terarah. Melalui proses implementasi program, muncul kesadaran bahwa setiap langkah perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan dalam menjunjung etika pelayanan publik. Integritas tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga terlihat dalam tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik dan mampu menjamin bahwa setiap inovasi dilakukan tanpa kepentingan pribadi maupun kelompok. Strategi pengembangan sikap ini dilakukan melalui komitmen keteladanan pimpinan, penguatan regulasi, peningkatan kesadaran nilai ASN BerAKHLAK, serta pembiasaan budaya kerja yang jujur dan amanah sebagai pondasi perubahan berkelanjutan.

2. Kerjasama

Aksi perubahan juga menghasilkan dampak terhadap penguatan perilaku kepemimpinan dalam membangun kerja sama yang efektif, baik antarpegawai, antarbidang, maupun dengan stakeholder eksternal. Pengelolaan program yang melibatkan banyak pihak memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan tidak dapat dicapai secara individu, melainkan

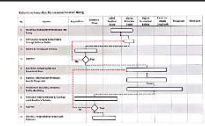
melalui kolaborasi, koordinasi yang intens, komunikasi terbuka, dan saling menghargai peran masing-masing. Perubahan pola interaksi dari kerja mandiri menjadi kerja kolaboratif merupakan salah satu indikator keberhasilan transformasi perilaku organisasi. Strategi pengembangannya dilakukan melalui peningkatan forum komunikasi, pembentukan tim kerja lintas fungsi, pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana koordinasi, serta penguatan budaya saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

3. Mengelola Perubahan

Dampak berikutnya adalah berkembangnya kemampuan kepemimpinan dalam mengelola perubahan secara adaptif, strategis, dan terukur. Pelaksanaan aksi perubahan memberikan pengalaman nyata bahwa perubahan bukan hanya tentang menciptakan inovasi, tetapi juga mengatur ritme transformasi agar diterima, dipahami, dan diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pihak yang terlibat. Kepemimpinan dituntut mampu membaca risiko, merancang solusi, serta melakukan penyesuaian tanpa meninggalkan semangat visi organisasi. Strategi pengembangan perilaku ini berfokus pada peningkatan kapasitas analitis, kemampuan mengambil keputusan berbasis data, penguatan sensitivitas terhadap dinamika lingkungan, serta membangun budaya siap bertransformasi melalui pembelajaran berkelanjutan, monitoring dan evaluasi berkala, serta komitmen keberlanjutan pasca program.

B. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Tabel 7.1 Progres Pengembangan Diri

No	Komponen/sub Komponen	Kegiatan Pengembangan Potensi Diri untuk Mendukung Pelaksanaan Aksi Perubahan	Kegiatan / Tahapan Aksi Perubahan	Waktu Pelaksanaan		Hasil
				Rencana	Realisasi	
1.	Tanggung Jawab	Tingkatkan rasa kepemilikan atas tugas dan tanggung jawab individu melalui penerapan target yang jelas dan penilaian kinerja berkala.	Menerapkan SOP evaluasi pemanfaatan ruang bersama tim efektif	Minggu III Oktober 2025	Minggu III Oktober 2025	
2.	Kejujuran	Perkuat motivasi peserta dengan memperjelas tujuan jangka panjang aksi perubahan.	Menghadap pimpinan terkait Masalah yang dihadapi dan komitmen jangka panjang aksi perubahan	Minggu II November 2025	Minggu II November 2025	
3.	Konsistensi	Dorong peserta untuk menjaga rutinitas dalam mencapai target melalui pencatatan kemajuan harian atau mingguan.	Memimpin tim efektif menjalankan SOP pemanfaatan ruang			 
4.	Pengambilan Keputusan	Simulasi Pengambilan Keputusan	Melaksanakan kegiatan implementasi SOP dan menjadi pengambil keputusan			

			dalam setiap ada kendala yang dihadapi oleh tim			
5.	Kerjasama Internal	Adakan workshop kolaboratif dan permainan tim untuk memperkuat koordinasi antar anggota tim.	Membentuk tim efektif dan menjadi pimpinan dari tim yang berkomitmen menjalankan kegiatan aksi perubahan			
6.	Kerjasama Eksternal	Berikan pelatihan komunikasi eksternal dan negosiasi untuk memperkuat hubungan dengan pihak luar, seperti stakeholder dan mitra kerja.	Berkomunikasi dengan masyarakat dan kepala desa untuk mensosialisasikan kegiatan aksi perubahan			
7.	Komunikasi	Kembangkan kemampuan komunikasi melalui pelatihan presentasi, public speaking, dan pengelolaan konflik.	Memimpin rapat dan menjadi pemateri untuk beberapa program pelatihan			
8.	Fleksibilitas	Pelatihan Adaptasi dan Responsif	Melaksanakan instruksi dari Pimpinan Dinas PUPR untuk melakukan beberapa perbaikan dan menerapkannya pada tim efektif			
9.	Pelayanan Publik	Tingkatkan pemahaman tentang pelayanan prima melalui pelatihan customer service untuk ASN.	Menyediakan fitur formulir online yang dapat diakses oleh masyarakat luas			

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Aksi perubahan ini berfokus pada upaya meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengendalian tata ruang melalui pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Program ini disusun secara terstruktur dalam tiga tahapan:

1. Pada jangka pendek, aksi perubahan difokuskan pada terbentuknya sistem perencanaan dan evaluasi pemanfaatan ruang yang lebih terstruktur melalui penerapan teknologi digital sederhana, forum komunikasi publik, serta penyusunan SOP yang dapat segera diimplementasikan. Hal ini menjadi langkah awal yang penting untuk memperbaiki koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang.
2. Pada jangka menengah, program diarahkan pada penguatan integrasi data sektoral dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Dengan adanya keterhubungan data dan komunikasi yang lebih sinergis, perencanaan tata ruang diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta meminimalisasi terjadinya tumpang tindih kebijakan antar sektor.
3. Sementara itu, pada jangka panjang, aksi perubahan menargetkan terwujudnya tata kelola penataan ruang yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini dicapai melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perencanaan tata ruang Kabupaten OKI dapat benar-

benar mendukung pembangunan daerah yang partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, ketiga tahapan ini saling terkait dan membentuk satu rangkaian yang utuh dalam mewujudkan tata kelola penataan ruang di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Melalui langkah-langkah terukur ini, diharapkan Bidang Penataan Ruang dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan kebijakan tata ruang yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di masa kini dan mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam karya tulis ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta kepada seluruh ASN yang menjadikan karya tulis ini sebagai referensi:

1. Bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, diharapkan dapat terus mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder dalam setiap tahapan perencanaan tata ruang. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi digital dan platform komunikasi publik, perlu dijadikan sarana utama untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan data spasial. Selain itu, dukungan kebijakan dan anggaran juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program aksi perubahan ini.
2. Bagi Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu memperkuat sistem integrasi data lintas sektor melalui kolaborasi dengan instansi terkait, seperti BAPPEDA, ATR/BPN, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi sektoral lainnya. Hal ini

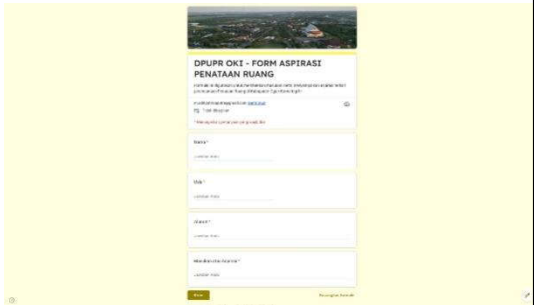
bertujuan agar data penataan ruang yang digunakan lebih akurat, mutakhir, dan saling terkoneksi sehingga dapat meminimalisasi tumpang tindih kebijakan. Dinas PUPR juga diharapkan terus meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, manajerial, maupun sertifikasi agar mampu menghadapi tantangan penataan ruang yang semakin kompleks.

3. Bagi ASN di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKI, penting untuk menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada transparansi, inovasi, dan partisipasi publik. ASN diharapkan mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan, serta menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan komitmen tersebut, ASN dapat menjadi motor penggerak perubahan yang berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola penataan ruang yang lebih modern, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- LAN RI (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia). (2017). *Pedoman Penyusunan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan*. Jakarta: LAN RI.
- LAN RI (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia). (2020). *Modul Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang *Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.
- Wibowo, A. (2016). *Manajemen Perubahan dalam Organisasi Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

DOKUMENTASI DAMPAK AKSI PERUBAHAN

BEFORE	AFTER
 <i>Pendataan Dilakukan Manual</i>	 <i>Pendataan Dilakukan Berbasis Cloud</i>
 <i>Koordinasi dan Pekerjaan Secara Manual</i>	 <i>Koordinasi dan Pekerjaan Berbasis Cloud</i>
 <i>Masukan dan Aspirasi Hanya Metode langsung</i>	 <i>Masukan dan Aspirasi Masyarakat Dapat Dilakukan Secara Online</i>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pernyataan dukungan terhadap Aksi Perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712) 321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. MAN WINARDI, M.T.
NIP : 196990220 199403 1 004
Jabatan : Kepala Dinas
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **"PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PENATAAN RUANG DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI"**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, November 2025
Yang membuat pernyataan

Ir. MAN WINARDI, M.T.
NIP. 196990220 199403 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat Jl Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712) 321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Apri Yanto, S.T., M.Si.
NIP : 19740426 200501 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Teknis
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **“PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PENATAAN RUANG DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI”**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan

Budi Apri Yanto, S.T., M.Si.
NIP. 19740426 200501 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712) 321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Budiman, S.T.
NIP : 19721014 200501 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **"PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PENATAAN RUANG DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI"**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan

Ir. Budiman, S.T.
NIP. 19721014 200501 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Alamat : Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712) 321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. Ahmad Fuad, S.Si
NIP : 19751121 201001 1 007
Jabatan : Kabid Penataan Ruang
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **“PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PENATAAN RUANG DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI”** dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, November 2025
Yang membuat pernyataan

H. Ahmad Fuad, S.Si
NIP. 19751121 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol. Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712)321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Amir Muhyiddin, ST., M.Si
NIP : 19861203 201101 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **“PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PENATAAN RUANG DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI”**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, November 2025
Yang membuat pernyataan


Ir. Amir Muhyiddin, ST., M.Si
NIP. 19861203 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat: Jl. Letkol Pol. H. Nawawi No. 96-97 Telp. (0712) 321051 Fax (0712) 322499 Kayuagung

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Rifki Imanuddin Kunto, S.T., M.Si.
NIP : 19860804 200903 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Unit : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan ini menyatakan dukungan terhadap kegiatan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan IV Tahun 2025 yang digagas oleh Sdr. Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si, Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengambil judul : **"PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PENATAAN RUANG DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI"**.

Diharapkan kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam menunjang pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kayuagung, Oktober 2025
Yang membuat pernyataan

Ir. Rifki Imanuddin Kunto, S.T., M.Si.
NIP. 19860804 200903 1 002

Lampiran 2

Dokumentasi Foto Dukungan Aksi perubahan

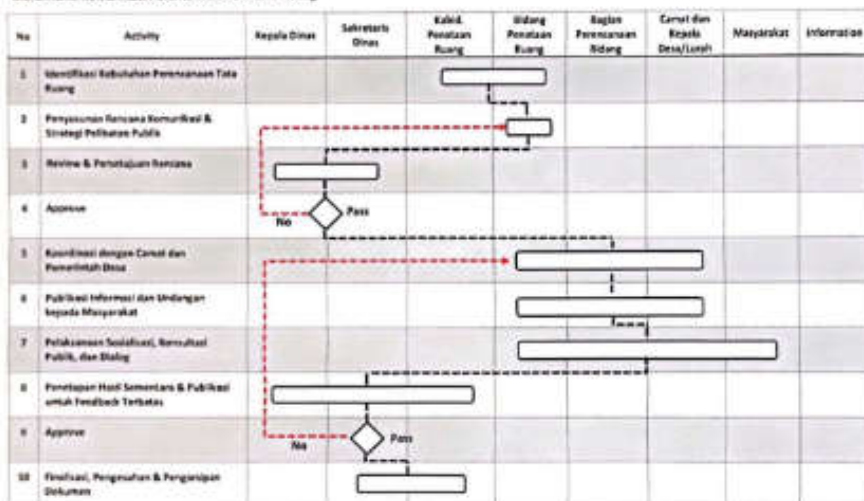


Lampiran 3

SOP Mekanisme Komunikasi Perencanaan Penataan Ruang

 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG		Nomor SOP	800003-SOP/PPUR/2025
		Tanggal Pembuatan	01 November 2025
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	01 November 2025
		Dibuat oleh	 Y. NANI WISMAR, S.T. NIP. 197007201904031004
SUB BAGIAN PENATAAN RUANG		Judul SOP	Mekanisme Komunikasi Perencanaan Penataan Ruang
DASAR HUKUM		BUNDAKSI PELAKSANA	
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kabupaten di Sumatera Selatan; 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sambutan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Sambutan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3); 3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 70 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Beda Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 70); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5) Peraturan Menteri AGRARIA dan Tata Ruang/Ruralisasi Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Penataan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.		1) Memahami teknik evaluasi perencanaan ruang 2) Memahami Spesifikasi Umum dan Spesifikasi Teknis 3) Mengetahui penggunaan aplikasi pengolahan data; 4) Minimal pendidikan D3/Sederajat	
KETERANGAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1) SOP Perencanaan Informal Tata Ruang; 2) SOP Penyusunan Rekomendasi Tata Ruang; 3) SOP Dokumentasi & Manajemen		1) File Manager 2) Komputer/PC 3) ATK	
PERINGKATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1) Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara situasi aktual dengan apa yang tertera pada SOP ini, wajib untuk melaporkan kepada atasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai insuksi pimpinan		SOP ini disimpan di ruang penyimpanan berbasis teknologi (berotak) dan softcopy (digital)	

Mekanisme Komunikasi Perencanaan Penataan Ruang



Lampiran 4

Komitmen Tindak Lanjut



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lintas 154, 16, Mangrove No. 96/77, Sukadana, Kota Bayungasin 30611
Telp. (0712) 110010 Fax. (0712) 112999
Email: disperum@ogankomering.go.id

KOMITMEN TINDAK LANJUT AKSI PERUBAHAN
NOMOR : 305/PK/DPUPR/OKI/2025

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN
PENATAAN RUANG DI DINAS PUPR KABUPATEN OKI

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : H. Ahmad Fuad, S.Si
NIP : 19751121 201001 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang

Selaku atasan langsung dari pegawai :

2. Nama : Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si
NIP : 198504262010011011
Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda

Sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2025

Dengan ini menyatakan komitmen bersama untuk menindaklanjuti Aksi Perubahan yang disusun oleh peserta PKP Angkatan IV tersebut diatas dan target dalam aksi perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran Kinerja Pegawai peserta yang bersangkutan pada tahun berikutnya.

Tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai adalah :

- Terciptanya sistem integrasi data dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder terkait, sehingga proses perencanaan tata ruang dapat berjalan lebih efektif, efisien.

Tujuan Jangka Panjang yang akan dicapai adalah :

- Terwujudnya tata kelola penataan ruang yang modern, inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, integrasi data sektoral serta pemanfaatan teknologi informasi.

Demikian pernyataan komitmen ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Penataan Ruang


H. Ahmad Fuad, S.Si
NIP. 19751121 201001 1 007

Kayugung, 24 Oktober 2025
Peserta DIKLAT


Ir. Eko Wahid Apriansyah, ST., M.Si
198504262010011011